

RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108 	PENGUJIAN KONSEKUENSI		
PROSEDUR TETAP	NO. DOKUMEN ZA/BIGRAM/26/ /2023 148	NO. REVISI 02	HALAMAN 1/2 Ditetapkan, DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN  dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19681011 199903 1 001
PENGERTIAN	Pengujian konsekuensi adalah proses tatalaksana mengenai standar operasional pengujian konsekuensi pada rumah sakit (pasien, keluarga pasien, masyarakat umum, dll) sebagai institusi pelayanan publik.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi petugas dalam : 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. 2. Memahami tata kelola pengujian konsekuensi daftar Informasi Publik.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUDZA Banda Aceh No: 701/60/2022, Tanggal 07 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.		
 PROSEDUR	1. PPID RSUDZA membuat Nota Dinas kepada PPID Utama terkait pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan pada RSUDZA. 2. PPID Utama menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan/rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID RSUDZA. 3. PPID RSUDZA menerima masukan informasi yang dikecualikan/rahasia dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan untuk dibahas bersama-sama dengan PPID Utama dan Tenaga Ahli melalui rapat koordinasi perumusan usulan daftar/jenis informasi yang dikecualikan/ dirahaskan. 4. Tim Pertimbangan, PPID RSUDZA dan PPID Utama serta atasan PPID menetapkan dan menyampaikan hasil kepada Gubernur. 5. Gubernur menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Surat Keputusan dan disampaikan untuk menjadi pedoman PPID RSUDZA dalam pelayanan publik pada masing-masing unit.		

RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108



PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO. DOKUMEN
ZA/BIGRAM/26/ /2023
148

NO. REVISI
02

HALAMAN
2/2

PROSEDUR

6. PPID RSUDZA :

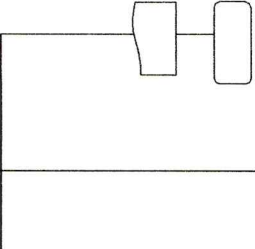
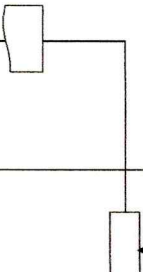
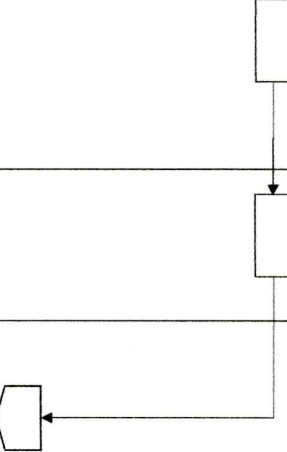
- a. Menyimpan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia untuk menghindari kebocoran; dan
- b. Membuka informasi selain yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualian/rahasia dengan memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik.

UNIT TERKAIT

Seluruh Unit

LAMPIRAN

Flowchart

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID RSUDZA	PPID UTAMA	TIM PERTIMBANGAN	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPID RSUDZA membuat Nota Dinas kepada PPID Utama terkait pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan pada RSUDZA.					1. Nota dinas 2. Format identifikasi informasi yang dikecualikan	1 hari kerja dan dilakukan minimal 1 tahun sekali	1. Nota dinas 2. Draf usulan informasi yang dikecualikan	
2.	PPID Utama menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan /rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID RSUDZA					Idem	5 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan / rahasia dari Tenaga pembantu administrasi/ fungsional	Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan	
3.	PPID RSUDZA menerima masukan informasi yang dikecualikan/ rahasia dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan untuk dibahas bersama-sama dengan PPID Utama dan Tenaga Ahli melalui rapat koordinasi perumusan usulan daftar /jenis informasi yang dikecualikan/ dirahaskan					Idem	10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari PPID Utama	Draft SK tentang Informasi yang dikecualikan/ rahasia	Dapat dihidirkan Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.

4.	Tim Pertimbangan, PPID RSUDZA dan PPID Utama serta atasan PPID menetapkan dan menyampaikan hasil kepada Gubernur.								Memverifikasi dan mengkaji adalah bentuk dari tindakan menguji konsekuensi dan kepentingan publik sebelum ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia
5.	Gubernur menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Surat Keputusan dan disampaikan untuk menjadi pedoman PPID RSUDZA dalam pelayanan publik pada masing-masing unit								
6.	PPID RSUDZA : a. Menyimpan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia untuk menghindari kebocoran; dan b. Membuka informasi selain yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia dengan memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik								